



## Analisis Perilaku Tambang Pasir Masyarakat Ipir Di Pesisir Pantai Yang Berdampak Terjadinya Bencana Abrasi

Maria Margareta<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

<sup>1</sup> marlynmargareta017@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 2 Juni 2022;

Revised: 20 Juni 2022 ;

Accepted: 26 Juni 2022.

### Kata kata kunci:

Abrasi;

Perilaku masyarakat;

Pesisir Pantai.

---

### : ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat Ipir sehingga terjadinya abrasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dilapangan tentang perilaku masyarakat pesisir pantai terhadap bencana abrasi di Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka yaitu penambangan pasir dan batu di pesisir pantai, serta penebangan pohon di sepanjang pesisir pantai. Dampak dari bencana abrasi bagi wilayah pesisir desa Ipir yaitu menyempitnya pemukiman warga, fasilitas jalan menjadi rusak, pohon-pohon penyangga air laut menjadi punah, dan rusaknya wilayah tangkapan ikan nelayan. dimana berbagai alasan yang dilakukan penambangan ini yaitu dijadikan sebagai bahan material bangunan, kebutuhan ekonomi, penebangan pohon pelindung pantai. Dampak dari perilaku masyarakat pesisir pantai yaitu kerusakan rumah permukiman warga, perubahan kondisi fisik pantai, dan menghambat aktifitas para nelayan. Sedangkan upaya masyarakat setempat dalam menanggulangi abrasi yaitu melalui edukasi penghijauan dan melalui partisipasi pemerintah dalam menjaga ekosistem yang ada di wilayah pesisir Desa Ipir.

---

### ABSTRACT

*Analysis of the Behavior of the Ipir Community Sand Mine on the Coastal Impact of Abrasion Disasters. This study aims to determine the behavior of the Ipir community so that the occurrence of harassment. The research method used is qualitative. Sources of data used are primary data and secondary data. The collection technique is in the form of observation, interview, and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, and drawing conclusions. The results of field research on the behavior of coastal communities against abrasion disasters in Ipir Village, Bola District, Sikka Regency, namely sand and stone mining on the coast, and tree felling along the coast. The impact of the abrasion disaster for the coastal area of Ipir village is the narrowing of residential areas, road facilities are damaged, trees that support seawater become extinct, and the fishing area is damaged. where the various reasons that this mining is carried out are used as building materials, economic needs, felling of coastal protection trees. The impact of coastal community behavior is damage to residential houses, changes in the physical condition of the beach, and inhibits the activities of fishermen. Meanwhile, the local community's efforts to overcome abrasion are through reforestation education and through government participation in maintaining the ecosystem in the coastal area of Ipir Village.*

---

### Keywords:

Abrasion;

Community Behavior;

Coast.

---

Copyright © 2022 (Maria Margareta). All Right Reserved

How to Cite : Margareta, M. Analisis Perilaku Tambang Pasir Masyarakat Ipir Di Pesisir Pantai Yang Berdampak Terjadinya Bencana Abrasi. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(6). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/933>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pada umumnya wilayah pesisir dipahami sebagai daerah peralihan antara laut dengan daratan. Dengan adanya peralihan seperti ini menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena di darat maupun di laut. Berbagai fenomena yang terjadi di darat yaitu abrasi, banjir, dan pembabatan hutan. Tentu aktivitas ini bertujuan memenuhi segala kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, fenomena-fenomena yang terjadi di laut juga memiliki peristiwa pasang surut, dan gelombang badai (Hastuti, 2012).

Fenomena yang terjadi di wilayah pesisir dapat disebabkan oleh kegiatan atau proses alami dan non alami (kegiatan manusia), baik berasal dari darat maupun laut (Supriyanto, 2013). Faktor alam itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti gempa dan gelombang tsunami. Hal ini terjadi karena rusaknya ekosistem pesisir sehingga tidak ada penghalang sebagai peredam gelombang tsunami (Arifin, 2013). Berkaitan dengan hal ini dengan sendirinya pemadatan daratan yang berdampak pada permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah (Nur Tajudin, 2014).

Aktivitas masyarakat pesisir pada umumnya meliputi aktivitas ekonomi, berupa kegiatan perikanan dengan memanfaatkan lahan darat, lahan air, dan laut terbuka. Selain itu terdapat kegiatan pariwisata dan rekreasi dengan memanfaatkan lahan darat, air, dan objek dibawah air. Demikian juga kegiatan transportasi laut yang memanfaatkan lahan darat dan laut untuk jalur pelayaran, kolam, dan pelabuhan. Sedangkan untuk kegiatan industri dapat memanfaatkan lahan darat dan laut. Dalam hubungan dengan aktivitas pembangkit energi dapat menggunakan lahan darat dan laut. Pada akhirnya, dalam konteks pemukiman dapat memanfaatkan lahan darat untuk perumahan, fasilitas pelayanan umum, kegiatan pertanian, dan kehutanan yang memanfaatkan lahan darat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, secara jelas membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuannya yaitu, (a) melindungi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (b) menciptakan keharmonisan dan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dan (d) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan paparan di atas Bergen (2012) mengatakan, aktivitas ekonomi sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diterapkan, mesti mengedepankan pendekatan keterpaduan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Hal yang perlu dilakukan misalnya: penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian yang terus menerus dilakukan untuk melestarikan keseimbangan ekologi lingkungan (Zamlawi, 2014).

Atas dasar paparan di atas, menjadi penting bagi masyarakat terkait pengetahuan tentang dampak dari kerusakan lingkungan terutama abrasi itu sendiri. Urgenitas dari pengetahuan ini dapat menjadi dasar kebijakan baru dan strategi mitigasi bagi pemangku kepentingan. Pertimbangan yang paling mendasar dapat diamati beberapa dekade terakhir di wilayah pesisir sering mengalami perambatan abrasi. Tentu hal ini menjadi ancaman serius dan pasti akan terus merambah kewilayah daratan. Namun di sisi lain masyarakat masih banyak belum memahami dampaknya dan sudah pasti berujung pada sikap bertahan dengan kebiasaan tersebut (Hadi Sudharto, 2014).

Demikian juga apa yang terjadi di Desa Ipir yang notabene suatu wilayah pesisir pantai selatan Kecamatan Bola, sering terkena dampak abrasi cukup memperhatikan. Berdasarkan observasi pra penelitian, pesisir pantai yang mengalami abrasi kurang lebih sudah sejauh 4 km diukur dari garis pantai

kepemukiman penduduk. Terjadinya abrasi di pesisir pantai Ipir ditandai dengan terjadinya pasang surut air laut disertai dengan gelombang laut tinggi akibat angin kencang. Abrasi tersebut terjadi di Desa Ipir, Dusun Ipir, RT/RW 001, RT/RW 003, RT/RW 004, RT/RW 005, RT/RW 008, RT/RW 010. Penduduk Desa Ipir yang tinggal dibagian wilayah pemukiman pesisir pantai mengalami dampak abrasi yang berakibat hilangnya lahan pemukiman dan lahan pencaharian mereka. Dampak lanjutan bagi masyarakat setempat berujung pada penurunan kualitas hidup mereka.

Penyebab utama terjadinya abrasi di Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka dikarenakan oleh perilaku masyarakat Desa Ipir sendiri. Mereka cenderung mengambil pasir serta batu di pesisir pantai untuk dijual dan untuk kegiatan pembangunan rumah serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dengan melihat penyebab kerusakan lahan pemukiman warga setempat pada dasarnya akibat dari ulah manusia itu sendiri. Mereka menyadari akibat dari perbuatannya, namun secara nyata mereka tetap melakukannya. Tentu alasan yang paling mendasar yaitu untuk mencukupi perekonomian keluarga mereka.

Dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2013 secara jelas mengatur larangan pengambilan pasir dan batu di pesisir pantai. Namun kembali lagi masyarakat setempat seolah-olah tidak mengetahui akan eksistensi dari perdes ini. Akibat dari perilaku yang bertolak belakang dengan perintah hukum dapat memberikan double kerugian. *Pertama*, secara hukum setiap individu dapat diseret dengan dasar pasal-pasal yang ada. *Kedua*, secara lingkungan perilaku tersebut akan merusak dan memberi bencana yang akan dirasakan seluruh masyarakat Desa Ipir.

Berdasarkan diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian atau kajian melalui suatu penelitian. Di dalam penelitian ini tujuan akhirnya yaitu untuk mengetahui perilaku masyarakat Ipir sehingga terjadinya abrasi. Selanjutnya untuk mengetahui dampak dari bencana abrasi bagi lingkungan pesisir desa Ipir dan untuk mengetahui upaya masyarakat setempat dalam menanggulangi bencana abrasi.

## Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka selama satu bulan mulai tanggal 24 April sampai 24 Maret 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif, dimana tekanannya pada objek alamiah yang berkembang apa adanya. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yaitu ada Kepala Desa atau aparat desa, Tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Ipir. Sumber data sekunder yaitu data yang berupa dokumentasi seperti, foto kondisi riil kerusakan lingkungan pesisir pantai Ipir dan buku-buku, jurnal dan surat kabar yang berhubungan dengan abrasi. Teknik dan prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu mengamati secara langsung perilaku masyarakat pesisir pantai terhadap bencana abrasi di Desa Ipir, Kecamatan Bola, kabupaten Sikka. Wawancara mendalam untuk memperoleh data-data yang tidak dapat diperoleh dari observasi. Tipe wawancara berupa terbuka dan tertutup. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen berupa foto, buku-buku, dan jurnal.

## Hasil dan pembahasan

Masyarakat pesisir Desa Ipir pada umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani. Berdasarkan hasil pengamatan, wilayah pesisir pantai memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dibandingkan wilayah-wilayah lain. Sumber daya yang terkandung di dalamnya terdapat sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Sumber daya manusia mencakup manusia itu sendiri yaitu jumlah, kualitas, pengetahuan, keterampilan, budaya, fasilitas, dan lembaga, dan masyarakat yang terdapat didalamnya. Sumber daya fisik mencakup sumber daya alam dan buatan. Menurut Endang Sutrisno (2014) sumber daya pesisir mesti mencakupi dua bidang kehidupan manusia yaitu sumber daya manusia

dan sumber daya alam. Kualitas manusia harus dipahami dari aspek integrasi antara sikap pengetahuan dalam mengelola alam demi kebermanfaatannya bagi masyarakat itu sendiri.

Wilayah pesisir sejatinya harus mendukung setiap aktivitas masyarakat di sector perekonomian dan sosial. Dalam perspektif perekonomian, masyarakat mampu membangun kesejahteraan hidup keluarga berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan dalam prinsip sosial sejatinya masyarakat mampu membangun semangat kolaboratif demi terciptanya masyarakat yang makmur. Atas dasar ini, mestinya wilayah pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus bagi semua pihak untuk membangun dan menjaga kualitas wilayah pesisir. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak merusak kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya baik kerusakan ekologi maupun ekonomi, dan sosial budaya (Irfon Ido, 2019; Wadu, Kasing, Gultom, & Mere, 2021).

Secara geografis, desa Ipir merupakan wilayah pesisir pantai selatan Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka yang terkena dampak abrasi cukup memprihatinkan. Desa ini terletak di pinggir pantai dan sebagian besar masyarakatnya bertempat tinggal di sepanjang pesisir pantai juga. Berbagai kerusakan baik material maupun non material sering dialami oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan daerah pesisir, terutama ulah masyarakat yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam pesisir. Pembahasan pertama tentang perilaku masyarakat pesisir pantai ipir sehingga terjadinya bencana abrasi.

Perilaku masyarakat pesisir pantai desa Ipir jelas tidak memberi kenyamanan terhadap lingkungan. Perihal tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat setempat terkait dampak dari eksploitasi lingkungan. Selain itu juga diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap semangat pelestarian alam serta kondisi ekonomi yang jauh dari kategori baik. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait perilaku masyarakat yang menyebabkan terjadinya abrasi yaitu: pertama, penambangan pasir dan batu di pesisir pantai. Menurut Dewi Anggariani (2020) secara ekonomis penambangan pasir di pesisir pantai bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya, apabila di dalamnya disertai dengan analisis dampak lingkungan.

Analisis ini harus sejalan dengan regulasi yang berlaku di daerah tersebut demi percepatan pertumbuhan perekonomian. Namun menjadi persoalan, aktivitas penambangan itu dapat membawa dampak negative terhadap ekosistem yang ada di daerah penambangan itu. Maka terkait dengan pandangan ini, aktivitas penambangan pasir dan batu di daerah pesisir mesti sejalan dengan kajian dampak lingkungan dan sejalan dengan regulasi yang berlaku. Pesolan terbesar yang dihadapi masyarakat desa Ipir yaitu kurangnya analisis dampak lingkungan terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Penambangan pasir dan batu dipesisir pantai Ipir sering dilakukan dengan cara mengeruk pasir sebanyak mungkin dalam insensitas tinggi. Hal ini secara jelas dapat mengurangi volume pasir dan batu yang berdampak pada menguras sedikit demi sedikit tepi daratan. Pada hal secara ekonomis, aktivitas penambangan pasir dan batu dilakukan dapat memenuhi kebutuhan manusia, jika hal itu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Akibat dari penambangan ini, berpengaruh langsung terhadap arah dan kecepatan air laut yang menghantam daerah pantai. Dalam hal ini Ferli Fajri (2012) menjelaskan besar kecilnya gelombang laut dapat membawa dampak tersendiri bagi pengerukan daerah pesisir suatu wilayah. Ketiadanya penghalang laju derasnya hampasan ombak akan berpotensi terhadap pengikisan pesisir pantai yang berujung pada abrasi yang tak terkendalikan. Atau dengan kata lain, jika tidak membawa pasir dan batu, air laut akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat menghantam pantai. Proses seperti ini tentu dapat menyebabkan terjadinya abrasi. Semua hal yang berkaitan dengan pandangan di atas tentu memiliki korelasi dengan perilaku masyarakat yang sering melakukan penambangan pasir dan batu di wilayah pesisir pantai.

Hal seperti ini juga terjadi di desa Ipir, dimana akibat ulah masyarakatnya menyebabkan pengikisan wilayah pesisir. Padahal secara jelas sudah diatur dalam peraturan pemerintah Desa Ipir

Nomor 3 Tahun 2013 tentang larangan pengambilan pasir dan batu dipesisir pantai. Setiap orang melakukan penambangan pasir dan batu di pesisir pantai tanpa memiliki izin maka dikenakan sanksi. Perilaku tersebut akan diseret menuju proses hukum. Perilaku yang bertolak belakang dengan perintah hukum itu dapat memberikan kerugian ganda. *Pertama*, secara hukum setiap individu dapat diseret dengan dasar pasal-pasal yang ada. *Kedua*, secara lingkungan perilaku tersebut akan merusak dan memberi bencana yang akan dirasakan seluruh masyarakat Desa Ipir. Namun hal ini tetap dilaksanakan dengan dalil untuk dijadikan sebagai bahan material bangunan serta memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Kedua, penebangan pohon pelindung pantai (pohon pandan dan pohon waru). Pantai secara alami telah memiliki pelindung, namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran dan hutan pantai untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk kebutuhan bahan bakar dan bahan bakar rumah. Aktivitas pengambilan kayu secara terus-menerus maka pohon-pohon di pesisir pantai akan berkurang dan habis (Achmad Rusdi, 2019). Tentu hal ini akan berdampak langsung terhadap ekosistem laut dan berujung pada erosi. Demikian juga apa yang terjadi di desa Ipir, keberadaan pepohonan disepanjang pesisir pantai telah ditebang habis untuk berbagai keperluan masyarakat itu sendiri. Aktivitas penebangan pohon ini tentu membawa dampak serius bagi masyarakat setempat, dimana air laut begitu mudah mengikis pesisir pantai.

Pada dasarnya, pohon pandan dan pohon waru tumbuh dipesisir pantai untuk mencegah terjadinya bencana abrasi. Pohon pandan dan pohon waru berfungsi sebagai pemecah ombak, pencegah abrasi, jika kita menanam pandan dan waru disekitar pantai tentu kita telah ikut serta menjadi penjaga pantai. Namun sayangnya banyak masyarakat yang belum memahami betapa penting dan manfaat dari pohon pandan dan pohon waru dipinggir pantai. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Ipir, Kecamatan Bola pohon pandan dan pohon waru yang tumbuh di sekitar pesisir pantai ditebang, dan dicabut. Perilaku inilah yang menyebabkan terjadi bencana abrasi. Masyarakat sepertinya belum punya kesadaran dari dalam diri untuk menjaga ekosistem di sekitar pantai untuk itulah sudah saatnya diperlukan ketegasan dan kerja sama pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat pesisir pantai untuk melakukan reboisasi dan menata kembali kawasan pantai.

Pembahasan kedua tentang dampak perilaku masyarakat pesisir pantai terhadap bencana abrasi. Menurut Zulmiro Pinto (2015) salah satu dampak terbesar terjadinya bencana abrasi adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wilayah pesisir. Dalam penelitiannya menjelaskan seluruh masyarakat pesisir tidak memahami kebermanfaatan segala ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir. Mereka memahami segala material yang terdapat di pesisir pantai dapat dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup dan ekonominya. Di desa Ipir dampak terbesar terjadinya abrasi diakibatkan oleh sikap acuh-tak acuh terhadap perdes yang berlaku dan lemahnya kesadaran akan dampak dari perbuatan mereka (aktivitas tambang batu, pasir dan penebangan pohon).

Akibat lanjut dari sikap masyarakat Ipir ini berdampak langsung terhadap mengikisnya wilayah pesisir sehingga menyempitnya permukiman bagi penduduk setempat, pohon-pohon penyangga hantaman ombak menjadi rusak dan bahkan sudah punah, jalan sepanjang pesisir pantai menjadi hancur di saat musim angin datang. Terhadap realitas ini, Ramadhan (2013) menjelaskan dampak dari perilaku masyarakat pesisir yang paling dominan yaitu (1) penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal dipinggir pantai secara terus menerus, (2) kerusakan hutan bakau disepanjang pantai karena terapan ombak yang didorong angin kencang yang begitu besar, (3) rusaknya infrastruktur disepanjang pantai, misalnya tiang listrik dan jalan, (4) rusaknya permukiman warga yang berada didekat pantai, (5) hilangnya berkumpulnya ikan-ikan karena terkikisnya hutan bakau.

Dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas dimana aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisika, dan biologi (Soemarwoto, 2014). Dalam konteks apa yang terjadi di desa Ipir di dominasi oleh aktivitas masyarakat setempat yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai oleh pertama, rusaknya tempat permukiman warga dan perubahan kondisi fisik pantai.

Kegiatan penambangan di wilayah pesisir pantai yang dilakukan berdampak pada kerusakan tempat permukiman warga yang ada di pesisir pantai. Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Ipir, dimana dampak abrasi mengakibatkan rumah masyarakat rusak akibat diterjang arus gelombang. Lebar pantai mengalami penyusutan, tanaman masyarakat disekitar pesisir pantai rusak karena tergerus abrasi. Rusaknya pohon pelindung sepanjang pantai karena gemburan ombak dan juga didorong oleh angin kencang, pantai menjadi curam dan terjal akibat terkikis oleh gelombang air laut. Air laut semakin menjorok ke darat yang berdampak pada kerusakan badan jalan disepanjang pesisir pantai. Hal inilah perlu adanya perhatian yang serius dari pihak pemerintah Desa Ipir untuk meminimalisir kerusakan lingkungan serta kerusakan fisik pantai yang mengurangi nilai keindahan pesisir pantai.

Hal yang kedua, terhambatnya aktivitas para nelayan. Akibat dari perilaku masyarakat diatas dapat menghambat aktivitas serta kesulitan yang dialami oleh para nelayan seperti menurunnya jumlah ikan yang dihasilkan. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Ipir, dimana nelayan tidak bisa melakukan aktivitasnya serta mengalami kesulitan dalam mencari ikan disekitar pantai karena gelombang air laut yang terlalu deras. Permasalahan ini justru berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Hal yang ketiga, upaya penanggulangan terjadinya abrasi di desa Ipir. Upaya penanggulangan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan segera mungkin setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Menurut Edwin Maulana (2016), terdapat beberapa solusi dalam pengurangan risiko terhadap abrasi yaitu dengancara mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini bisa dipecahkan menjadi dua macam, yaitu struktural mitigasi dan mitigasi-non struktural. Mitigasi struktural mengacu pada tindakan meminimalisir bencana dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan pendekatan teknologi. Sedangkan mitigasi non struktural mengarah pada upaya meminimalisir dampak bencana selain dari prasarana fisik maupun pendekatan teknologi. Hal ini dapat diamati dalam pembuatan kebijakan, peraturan, maupun penguatan kapasitas masyarakat. Hal yang perlu dibahas di sini yaitu terkait penerapan mitigasi struktural. Beberapa strategi mekanik yang dilakukan adalah mengupayakan bangunan pemecah ombak dan penanaman mangrove di sepanjang pesisir.

Upaya masyarakat dalam penanggulangan abrasi dipesisir pantai Desa Ipir merupakan usaha masyarakat untuk membantu berhasilnya program penanggulangan abrasi sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, upaya masyarakat dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Desa Ipir berupa, peninggian rumah atau tempat tinggal masyarakat di pesisir pantai. Selain itu juga pelarangan pengambilan batu dan pasir serta terumbu karang yang ada disekitar pesisir pantai Desa Ipir. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat hanya mencegah abrasi dengan melakukan peninggian rumah, sementara yang paling dibutuhkan di lokasi yang terkena abrasi adalah dengan melakukan penanaman serta pelestarian pohon pelindung pantai.

Idealnya langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam upaya mengatasi masalah abrasi pantai: (1) pelestarian terumbu karang yaitu melakukan rehabilitasi lingkungan pesisir yang hutan bakaunya sudah punah baik dari dari abrasi itu sendiri maupun dari pembukaan lahan, (2) pelarangan pengambilan pasir dan batu, (3) usaha pembangunan pengamanan pantai, mereklamasi bekas lubang tambang pasir dan batu (Islahudin, 2012). Pada tataran pemerintahan, upaya yang mesti dilakukan dalam mencegah abrasi yaitu sesegera mungkin membuat kebijakan terkait menyelamatkan wilayah pesisir dari ancaman abrasi. Kehadiran pemerintah, baik pusat maupun daerah sangat penting dilakukan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu rangkaian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarana prasarana (Deni Natsir Ahmad, 2017). Penanggulangan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana (Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Hal yang dikaitkan dengan upaya penanggulangan abrasi di Desa Ipir dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatasi dan mencegah suatu kejadian atau bencana yang sudah terjadi agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Upaya pemerintah Desa Ipir dalam penanggulangan abrasi dipesisir pantai Desa Ipir dilakukan dengan berbagai cara antara lain; (1) pembangunan dinding pantai atau pembangunan tunggal pemecah gelombang, (2) merelokasikan warga yang terkena abrasi, (3) melakukan sosialisasi tanggap bencana, (4) melakukan penghijauan, (5) pelarangan pengambilan pasir dan batu serta terumbu karang dipesisir pantai.

### Simpulan

Masalah abrasi pada wilayah pesisir merupakan masalah klasik yang sering terjadi decade terakhir. Berbagai macam faktor penyebabnya, mulai dari alam itu sendiri maupun oleh ulah manusia. Terhadap masalah abrasi di desa Ipir diakibatkan oleh perilaku masyarakat setempat yaitu melalui penambang pasir, batu, dan penebangan pohon penyangga air laut di daerah pesisir pantai. Sedangkan dampak dari perbuatan masyarakat desa Ipir yaitu mengikisnya wilayah pesisir sehingga menyempitnya permukiman bagi penduduk setempat, pohon-pohon penyangga hantaman ombak menjadi rusak dan bahkan sudah punah, jalan sepanjang pesisir pantai menjadi hancur di saat musim agin datang. Upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat desa Ipir, perlunya beberapa pendekatan yaitu melalui edukasi pentingnya menjaga ekosistem wilayah pesisir dan melalui campur tangan pemerintah.

### Referensi

- Ahmad, Deni Natsir, (2017), Penyuluhan dan Pelatihan Upaya Pencegahan Abrasi Pantai pada Masyarakat Muara Gembong Bekasi, Jurnal Panrita Abdi, Vol.1, No. 2, Hal. 90-96.
- Anggariani, Dewi, (2020). Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai, Jurnal SIGn, Vol.1, no.1, hal. 15-29.
- Bengen, D. (2012). *"Pedoman Teknis Pengenalan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove"*. Bogor. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Kelautan, IPB. Buckles.
- Fajri, Ferli (2012). Studi Abrasi Pantai Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol.17, No. 2, Hal. 34-42.
- Hadi, P. Sudharto. (2014). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hastuti. (2012). *Wilayah Pesisir Dan Fenomena-Fenomena Yang Terjadi Di Pantai*. Makassar: Universitas Hassanudin.
- Irfon Ido. (2019). *Dampak Usaha Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Mata Pencaharian*.
- Maulana, Edwin, (2016). Strategi Pengurangan Risiko Abrasi Di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS, Vol. 1, No.1, Hal. 389-398.
- Nur, M. Tajudin. (2014). *"Abrasi Pantai Dan Proses Bermigrasi"*. Desertasi Program Studi Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (PKLH). Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Pintoi, Zulmiro, (2015). Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY), Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol.3, No.3, Hal. 163-174.
- Ramadhan. (2013). *Buku Panduan Pencegahan Abrasi Pantai, Jurusan Pendidikan Geografi, Sekolah Pasca Sarjana : Universitas Pendidikan Nasional*.
- Rusdi, Achmad. (2019). Pemecah Gelombang Dengan Soft Dan Hard Solution, Abdimas: Papua Journal of Community Service, Vol. 1, No.1, Hal. 21-31.
- Soemarwoto. (2014). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2013). *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Endang, (2014), Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan Di Kota Cirebon, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No.1, Hal. 1-12.

- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana Dan Fikih Kebencanaan Terhadap Perilaku Masyarakat Pesisir Pantai*.
- Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007. *“Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil”*.
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2013. *“Larangan Pengambilan Pasir Dan Batu Di Pesisir Pantai”*. Desa Ipir, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka.
- Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). Child character building through the takaplager village children forum. In 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020) (pp. 31-35). Atlantis Press.
- Zamlawi. (2014). *Etika Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan & Kebudayaan.